

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015–2020 dari tahap ke tiga pembangunan jangka panjang 2005-2025. Tahun 2017 merupakan tahun kedua Kepemimpinan Bupati periode 2016-2021 dan RPJMD 2016-2021 masih dalam proses penyusunan sehingga RKPD tahun 2017 disusun bersama-sama dengan proses penyusunan RPJMD. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/GJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 bahwa penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Visi Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”**.

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dengan memperhatikan visi-misi Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih dan mempertimbangkan capaian hasil pembangunan pada tahun tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi pada tahun 2017, sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 ditetapkan dengan tema sebagai berikut “MEMPERKOKOH LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI KABUPATEN PURBALINGGA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN LAYAK DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBERIKAN PERHATIAN UTAMA PADA PEMENUHAN HAK DASAR RAKYAT DENGAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

A. Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.

C. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus dibangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :

1. Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

D. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat

lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran :

1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Meningkatkan pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
6. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan budaya gemar membaca.
8. Meningkatkan apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
9. Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga.

E. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan

kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing pariwisata.
3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
6. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
8. Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
9. Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

F. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-6 adalah :

1. Mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah.
 - b. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai.
 - c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
 - d. Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi.
 - e. Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan.
 - f. Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga.
 - g. Meningkatnya akses pelayanan persampahan.
 - h. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa konstruksi.
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
3. Meningkatnya kualitas layanan angkutan orang dan barang, dengan sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan.
4. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.
6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah.

G. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air

pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Tabel 5.1
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan prakiraan Maju tahun 2018
Kabupaten Purbalingga

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	indeks	77,6	78,5	79
		Opini audit keuangan BPK	opini	WDP	WTP	WTP
		Persentase kepemilikan KTP	persen	91,93	92,5	93
		Persentase kepemilikan akte	persen	81,63	83	84
	Tujuan : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat					
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	100	100	100
2.	Menurunnya indeks resiko bencana	Persentase korban bencana yang terlayani	Persen	100	100	100
		Persentase bencana kebakaran yang terlayani	Persen	31	40	45
3.	Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	60	-	70

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
	Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan					
1.	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84	87	88
		Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	163	166	168
	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni					
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	persen	88,6	90,5	91,3
		Persentase kepemilikan rumah	persen	80,12	83,12	84,62
	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,78	12,1	12,3
		Rata2 lama sekolah	Tahun	6,85	7,15	7,33
		APK SD/Sederajat	Angka	109	109	109
		APK SMP/Sederajat	Angka	100	100	100
		APM SD/Sederajat	Angka	91	91	91
		APM SMP/ Sederajat	Angka	69	70	70
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,8	73	73,1
		Kasus Kematian Ibu	Per 100 ribu KH	136	88	74
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	10	8	7
		Prevalensi balita gizi buruk	persen	0,11	0,11	0,11
3.	Terkendalnya laju pertumbuhan	Laju Pertumbuhan	persen	1,06	< 1	< 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
	penduduk	Penduduk				
		Persentase peserta KB aktif	Persen	88	90	90
		Persentase PUS tak terlayani	Persen	11,9	11,5	11
4.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	75,1	77	78
5.	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	24	40	50
6.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	63,43	> 64	> 65
		Persentase kekerasan anak yg tertangani	Persen	100	100	100
7.	Meningkatnya budaya gemar membaca	Persentase desa memiliki perpustakaan	Persen	23	35	43
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	unit	11	11	11
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	65	68	70
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional	orang	2	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat					

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
1.	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	230.000	320.000	470.000
		Lama waktu perijinan investasi	hari	6	5,2	5
2.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	1.579	2.179	2.529
3.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Nilai PDRB Sektor Industri	triliun rupiah	3,9	4,4	4,7
4.	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Tingkat Pengang-guran Terbuka	persen	5,13	< 5	< 5
		Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	persen	79	85	90
5.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Persentase koperasi sehat	unit	59	65	68
		Jumlah usaha mikro bersertifikat / ijin	unit	268	473	653
6.	Meningkatnya kemandi rian dan daya saing Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,9	5,5	5,9
		Produksi padi	Ton	249.691	254.711	257.258
		Produksi jagung	Ton	39.339	40.130	40.531
		Produksi kedele	Ton	221	225	228
		Produksi daging	Ton	14.346	14.634	14.781

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
7.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	282	308	320
		Produksi Ikan Konsumsi	ton	4.872	5.067	5.164
8.	Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Pasar yang memenuhi standar SNI	unit	0	1	3
9	Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi	Persentase calon transmigran dilatih	persen	100	100	100
Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan						
1.	Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	74,97	77,05	78,32
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	93,04	93,75	94
		Persentase lajur jalan minimal 5,5 M	Persen	7,05	12,75	15,94
		Persentase drainase perkotaan	Persen	20,20	22,56	23,75
2.	Meningkatnya keterse-diaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai	Persentase bangu-nan pengairan dalam kondisi baik	Persen	38,56	42,3	43,8
		Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,5	89	89,5
3.	Meningkatnya Akses Aman Air	Persentase rumah	Persen	78,55	88,57	94,25

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
	Minum yang Berkelanjutan	tangga mengakses air bersih				
4.	Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	Persentase rumah Tangga terlayani sistem air limbah	Persen	70	85	92,5
5.	Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Rasio timbulan sampah terlayani	Persen	59,6	59,8	58,9
6.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfa- atan ruang yg efektif	Persentase ruang terbuka hijau publik	Persen	17,89	18,31	18,51
	Tujuan : Meningkatkan kualitas kawasan permukiman					
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	32,39	21,5	16,2
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan angkutan orang dan barang					
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	persen	4,6	5	5
	Tujuan : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik					
1.	Meningkatnya imple-mentasi e <i>government</i> dan keterbukaan	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan	persen	25	31	34

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018
1	2	3	4	5	7	8
	informasi publik	memiliki website aktif				
	Tujuan : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa					
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Persentase desa dengan BUM Desa sehat	Persen	52	68	76
	Tujuan : Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah					
1.	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	persen	60	70	80
	Tujuan 1 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati					
1.	Terkendalinya pence-maran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	47,79	64	64,5

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1. Isu Strategis

Isu Strategis daerah Kabupaten Purbalingga diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Isu Strategis yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 meliputi :

1. Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan agar dapat dicapai tujuan pembangunan dan tujuan penyelenggaraan negara sesuai amanat konstitusi.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi kompleks. Dilihat dari aspek penyebab, terjadinya kemiskinan dapat disebabkan karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Penyebab yang bersifat internal antara lain : 1) keterbatasan kondisi fisik seperti kecacatan (termasuk kecacatan mental); 2) terbatasnya kapasitas dan kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya; 3) keterbatasan kepemilikan aset yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. Berdasarkan penyebab yang bersifat eksternal, kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang tidak pro poor ; 2) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya budaya yang tidak produktif; 3) kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kondisi lingkungan alam yang kurang menunjang kehidupan masyarakat seperti tanah yang tandus, rawan bencana dan sebagainya.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu menyentuh akar penyebabnya tidak hanya menangani gejala yang nampak, harus mencakup seluruh strata keluarga miskin dengan sasaran yang jelas dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan dilaksanakan secara terus-menerus. Berdasarkan kondisinya, keluarga miskin dikelompokkan menjadi 4 (empat) klaster. Klaster 1 yaitu keluarga miskin yang tidak memiliki potensi untuk diberdayakan agar mampu melakukan aktivitas produktif seperti misalnya orang lanjut usia yang tidak memiliki pengampu, anak terlantar, penyandang cacat ganda, dan sebagainya. Untuk keluarga miskin klaster 1, satu-satunya intervensi yang harus diberikan oleh pemerintah adalah upaya yang bersifat karitatif yaitu dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat termasuk di dalamnya memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Keluarga miskin klaster 2 adalah keluarga miskin yang masih memungkinkan untuk diberdayakan meskipun dalam skala yang terbatas.

Termasuk dalam klaster 2 adalah keluarga miskin dalam usia produktif yang sehat secara jasmani dan mental meskipun tidak memiliki aset produktif atau memiliki dalam skala yang sangat terbatas. Intervensi pemerintah yang dapat diberikan kepada keluarga miskin klaster 2 adalah berupa upaya pemberdayaan yang dilakukan bersamaan dengan upaya karitatif yaitu pemberian bantuan/stimulan bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Keluarga miskin klaster 3 adalah keluarga miskin yang memiliki aktivitas produktif meskipun dalam skala mikro sehingga masih memungkinkan untuk dientaskan. Di samping pemberian bantuan stimulan untuk mengurangi beban pengeluarannya, upaya pengentasan keluarga miskin klaster 3 dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan usaha, fasilitasi permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, dan sebagainya. Adapun klaster 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang membutuhkan dukungan dan fasilitasi pemerintah melalui berbagai program pembangunan agar tidak jatuh miskin terutama ketika terjadi gejolak ekonomi yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan hidup pokok.

Di samping intervensi dalam rangka pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, yang paling bersifat strategis adalah upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada anak keturunannya untuk memutus rantai kemiskinan. Agar tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya, anak-anak keluarga miskin harus tercukupi kebutuhan hidupnya secara memadai berupa pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan anak-anak keluarga miskin dapat mengalami tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta cukup memiliki bekal ilmu dan keterampilan sehingga memiliki daya saing untuk memperoleh lapangan pekerjaan atau berusaha secara mandiri.

Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 19,75 persen.

Sedangkan pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

2. Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 66.23 dan mengalami kenaikan pada tahun

2015 menjadi sebesar 67.02. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 68.78 pada tahun 2014 dan 69.49 pada tahun 2015. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 menempati urutan ke-26 se Jawa Tengah, sedangkan capaian IPM tahun 2015 menempati urutan yang ke-27 se Jawa Tengah.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan kesehatan. Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 72.80 dan capaian pada tahun 2015 tetap, tidak mengalami kenaikan. Capaian AHH ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 73.88 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 73.98 pada tahun 2015. Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi posisi ke - 29 / 30 se-Jawa Tengah dan pada tahun 2015 berada pada urutan 30.

Indikator bidang pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya adalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2014 capaian HLS Kabupaten Purbalingga sebesar 11.51 dan meningkat menjadi 11.78 pada tahun 2015. Capaian HLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12.17 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 12.78 pada tahun 2015. Capaian HLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 28 se Jawa Tengah, sedangkan capaian tahun 2015 menempati urutan ke – 31.

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun

lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.84 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 6.85 pada tahun 2015. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.93 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 7.03 pada tahun 2015. Capaian RLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 19 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada urutan ke – 21.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 8.539 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 8.838 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9.640 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9.930 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli Kabupaten

Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke 27 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada peringkat ke 25.

Salah satu agenda pembangunan yang telah disepakati secara global yang dapat menjadi referensi dan menjadi dasar dalam perumusan isu strategis adalah komitmen Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan pada United Nation Summit tahun 1990 oleh PBB. MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur yaitu terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDG's sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan dalam MDGs telah berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil

atau Civil Society Organization (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 global goals dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global, maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Berdasarkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah setingkat SD sampai dengan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (tingkat kesejahteraan 40 persen terendah) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 87.492 anak. Dari jumlah tersebut terdapat 1.970 anak usia sekolah setingkat SD (usia 7 – 12 tahun) yang tidak sekolah (4.46 persen), dan 5.450 anak usia sekolah setingkat SMP (usia 13 – 15 tahun) yang tidak sekolah (22,75 persen). Sedangkan pada usia sekolah SM (usia 16 – 18 tahun) yang tidak sekolah sebanyak 13.265 anak (68.45 persen). Tetapi berdasarkan hasil pendataan inisiatif pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah anak usia sekolah SD yang tidak sekolah sebanyak 1.159 anak, dan anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak. Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi

dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disamping capaian AHH yang masih rendah, berdasarkan hasil PBDT 2015 masih terdapat 16.150 orang yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya, dari 98.371 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah hasil PBDT 2015, masih terdapat 34.245 rumah tangga atau 34.81 persen yang tidak memiliki akses jamban baik jamban sendiri maupun jamban bersama.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

3. Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar

Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Menurunnya pertumbuhan Sektor Pertanian adalah wajar dan menunjukkan dinamika perekonomian yang positif. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, maka meskipun terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian, pada saatnya akan sampai pada titik maksimal sehingga produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 persen, lebih rendah dibanding TPT tahun 2013, yaitu sebesar 5,72 persen. Tingkat

pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka Indeks Gini sebesar 0,32.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek multiplier yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

4. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru

untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran

aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

Pengelolaan persampahan merupakan permasalahan penting yang selama ini belum mampu ditangani secara optimal. Saat ini pelayanan persampahan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Jumlah potensi timbulan sampah jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk mencapai 1.942,6 m³ per hari atau 58.278 m³ per bulan atau melebihi volume candi Borobudur (55.000 m³). Besarnya timbulan sampah yang tidak tertangani di samping akan mengganggu keindahan dan kenyamanan juga akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, udara serta gangguan kesehatan dan estetika. Keterbatasan kapasitas penanganan sampah di samping karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sementara dan jumlah tenaga kebersihan yang ada juga karena terbatasnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini. Berdasar hasil kajian, kapasitas sisa lahan TPA Banjaran pada tahun 2016 tinggal 31.855 m³, tahun 2017 tinggal 17.422 m³, dan tahun 2018 sampai bulan Pebruari tinggal 2.989 m³, sehingga pada tahun 2018 harus dipindah ke lokasi lain atau dilakukan treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas dan/atau merubah manajemen pengelolaan sampah sehingga umur ekonomi TPA dapat diperpanjang. Pemindahan TPA ke lokasi lain dihadapkan pada kesulitan menentukan lokasi baru yang memenuhi syarat teknis serta adanya kendala akses angkutan sampah (jarak tempuh dan kapasitas jalan yang akan dilalui) dan efisiensi dalam operasionalisasinya. Di samping itu, pemindahan TPA juga harus memperhatikan aspek sosiologis, ekologis dan ekonomis agar permasalahan yang terjadi pada TPA yang lama tidak terulang kembali. Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan adalah terkait sistem pengelolaan dan kelembagaan

pengelola. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk TPA, perlu implementasi konsep 3 R (reuse, reduce, recycle) mulai dari hulu (tingkat rumah tangga), tingkat kelompok masyarakat, sampai dengan pengelolaan akhir di TPA. Selama ini pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem open dumping yang kemudian pada beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan sistem controlled landfill (dan itupun belum dilaksanakan secara konsisten). Kelembagaan pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Apabila permasalahan persampahan tidak segera ditangani secara sistematis, maka dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan semakin sulit untuk dicarikan solusi pemecahannya.

5. Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama

Salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme. Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarak kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

6. Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degenartif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi

mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

7. Tata kelola Pemerintahan

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (strategic vision). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan

kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada tahun 2015 nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik) dengan skor 50,5.

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *meryt system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

4.3.2. Prioritas Pembangunan

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Purbalingga tahun 2017 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah

Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan RKP Tahun 2017, juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten.

Pembangunan Kabupaten Purbalingga menyelaraskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain menyelaraskan pembangunan nasional Kabupaten Purbalingga juga menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.
- b. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,

peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.

- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra / klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran.
- e. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

4.3.2.1. Prioritas Kabupaten Purbalingga

Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penciptaan Landasan yang Kokoh untuk Pelaksanaan Pembangunan.

Guna mendorong terwujudnya landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, ditempuh melalui 3 (tiga) strategi pembangunan, yaitu :

1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kebijakan dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain dilakukan melalui : (1) meningkatkan kompetensi dan intelektualitas aparatur; (2) penyusunan struktur organisasi dan kelembagaan yang sesuai dengan fungsi dan beban kerja; (3) perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan pemerintahan; dan (4) meningkatkan integritas dan sikap positif utamanya bagi aparatur pemerintah daerah.

2. Mendorong terciptanya kehidupan yang religius, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Tujuannya utamanya adalah mewujudkan tatanan kehidupan dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang religius, aman, tentram dan harmonis.
3. Pemenuhan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia. Tujuannya utamanya adalah untuk menjamin kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat, utamanya bagi keluarga miskin.

B. Pengutamaan Pelaksanaan Empat Pilar Pembangunan

1. Pembangunan Kualitas Manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purbalingga. Kualitas hidup manusia menyangkut dimensi fisik dan mental spiritual, sehingga selain harus sehat dan cerdas, juga harus memiliki mental serta karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia utamanya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Pembangunan Perdesaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah perdesaan yang terdiri atas 224 desa dan 15 kelurahan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pembangunan di Purbalingga dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Saat ini masih dirasa adanya disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tujuan pembangunan perdesaan adalah mendorong agar wilayah perdesaan menjadi tempat yang nyaman, menarik dan produktif untuk permukiman tempat tinggal serta tempat bekerja dan melaksanakan kegiatan usaha, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan antara lain adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendongkrak

daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan kapasitas dan kualitas hidup manusia.

4. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana wilayah yang memadai dan terintegrasi sebagai penunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang aktifitas masyarakat secara merata.

C. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan pembangunan, haruslah didasarkan pada filosofi yang sangat penting dan harus melandasi setiap pelaksanaan pembangunan yaitu filosofi pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan diupayakan seminimal mungkin mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

D. Dukungan Sektor Lainnya secara Sinergis

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi.

Di samping hal-hal tersebut diatas, adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Sehingga diperlukan adanya ketepatan alokasi investasi pembangunan dan dihindari adanya overlapping, duplikasi, atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antara bidang pembangunan. Sebaliknya dibutuhkan adanya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program, dan kegiatan maupun antar bidang pembangunan.